

Surat Arahannya Danantara, Antara Langkah Sigap Koordinasi dan Kelembaman Birokrasi

Disusun oleh:

Michael A. Kaihatu (Partner)

Pada tanggal 5 Mei 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara yang merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan badan usaha milik negara sebagaimana didirikan dan diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2025, menerbitkan surat arahan kepada BUMN dan Anak Usaha BUMN nomor S-027/DI-BP/V/2025 dengan judul surat Arahan Terkait Pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN dan Anak Usaha BUMN ("**Surat Arahan**"), yang memberikan arahan bagi BUMN dan anak usaha BUMN untuk:

- Menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan anak usaha langsung dan tidak langsung BUMN (kecuali BUMN dan anak usaha yang berbentuk perusahaan publik) sebelum mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu dari BPI Danantara dan Holding Operasional;
- Seluruh kegiatan aksi korporasi (termasuk namun tidak terbatas pada penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, investasi, divestasi) dan kontrak jangka panjang yang signifikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional; dan
- Membuat laporan secara berkala dan rutin sesuai kebutuhan korporasi kepada BPI Danantara dan Holding Operasional.

Beberapa hal dibawah ini merupakan catatan atas penerbitan Surat Arahan tersebut.

Kesigapan Koordinasi Kelembagaan

Pembentukan Danantara dan holding BUMN sejatinya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar BUMN dan anak usaha BUMN dengan menciptakan keselarasan dan efektifitas badan usaha yang ada sehingga tidak terjadi persaingan internal BUMN dan anak usaha BUMN. Dengan adanya keserasian dan keselarasan tersebut pemerintah melalui BUMN dapat mengelola sumberdaya yang ada dengan lebih efektif dan efisien. Kekuatan Danantara untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan semua sumber daya yang dimilikinya tentunya sangat ditentukan oleh leadership dan system yang dibangun oleh Danantara. Kelemahan dalam leadership dan kegagalan menciptakan system yang efektif berpotensi membawa pada situasi kelembaman birokrasi. Sejak awal pembentukan struktur baru BUMN dan anak usaha BUMN mencetuskan banyak diskusi dan argument mengenai fungsi dan relasi diantara Danantara, Kementerian BUMN, Holding BUMN, dan Kementerian teknis terkait dan Perusahaan BUMN dan anak usaha BUMN yang melaksanakan kegiatan operasional. Pembagian tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing entitas yang diformulasikan dalam UU BUMN No 1 Tahun 2025 perlu implementasi pedoman yang jelas dengan belajar dari realita yang ada dalam pelaksanaan koordinasi antara badan dan lembaga pemerintah yang ada.

Implikasi terhadap Manajemen BUMN dan anak usaha BUMN

Salah satu arahan yang mengharuskan penundaan terhadap RUPS dan aksi korporasi signifikan sebelum mendapat kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional sedikit banyak akan berdampak terhadap kinerja BUMN dan anak usaha BUMN, paling tidak untuk periode jangka pendek.

Kondisi perekonomian global yang masih kurang baik membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam eksekusi arah kebijakan untuk meningkatkan daya saing. Penundaan terhadap proses yang sedang berjalan maupun rencana-rencana bisnis yang telah disusun sejak setahun lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu dapat berisiko kehilangan peluang yang semestinya segera ditindaklanjuti.

Selain potensi kehilangan peluang akibat kelambatan dan penundaan yang muncul yang dapat melemahkan daya saing, dari sisi manajemen BUMN dan anak usaha BUMN bisa menyebabkan kewenangan manajemen perusahaan terkekang karena keputusan strategis yang sudah direncanakan dan dirumuskan tidak dapat ditindaklanjuti. Hal ini berpotensi melemahkan semangat dan motivasi manajemen untuk melakukan inovasi dan mengambil terobosan-terobosan dan langkah-langkah inisiatif menghadapi tantangan yang dihadapi perusahaan. Diharapkan BPI Danantara dan Holding Operasional dapat juga sigap dan cepat dalam melakukan pengkajian dan memberikan arahan kepada BUMN dan anak usaha BUMN terkait sehingga memitigasi resiko kehilangan peluang yang bisa menimbulkan kelemahan daya saing.

Koordinasi dalam Pelaksanaan

Dipahami bahwa Surat Arahan ini merupakan langkah koordinasi yang penting untuk Danantara mengidentifikasi potensi dan resiko operasional BUMN dan anak usaha BUMN secara menyeluruh ke depan. Dalam pelaksanaannya manajemen BUMN diemban tugas untuk menyampaikan usulan dan melaporkan rencana kegiatan yang sedang berjalan maupun aksi korporasi signifikan yang akan dilakukan. Di lapangan dapat muncul ketidakpastian dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan usulan atau proposal rencana yang akan dilaksanakan karena ketiadaan format dan ketentuan saluran komunikasi yang lebih spesifik dalam Surat Arahan. BUMN dan anak usaha BUMN tentunya beroperasi dalam realitas mikro kegiatan usahanya sedangkan Danantara lebih melihat dari perspektif makro. Perbedaan perspektif ini berpotensi menciptakan perbedaan dalam arah dan strategi entitas BUMN dan anak usaha BUMN. Penyediaan saluran dan prosedur komunikasi yang diformat dengan jelas diharapkan akan menciptakan sinergi yang optimal bagi koordinasi Danantara dengan BUMN serta anak usaha BUMN.

Akhirnya menjadi harapan semua pihak bahwa Danantara dapat menyeimbangkan antara penguatan pengawasan dan tata kelola yang baik dengan kelincahan dan kesigapan organisasi sehingga dapat membangun kekuatan korporasi milik negara yang disegani di manca negara dan terus menjadi roda penggerak perekonomian bangsa.

- o0o -

The article above was prepared by Dentons HPRP's lawyers

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at dentons.hprp@dentons.com.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Ponggawa & Partners.